

Revolusi fisik di Jakarta tahun 1945- 1950 : Kota Jakarta menjadi kota diplomasi menurut sudut pandang teori diplomasi preventif

Fauzi Rinaldie

Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur, 13220, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia,
fauzirinaldie@gmail.com

Abstract

The spread of the Proclamation of Independence of Indonesia was not the end of the Indonesian struggle. At that time, the Japanese had not yet left their feet, and while the Allies were coming to take their prisoners and repatriate the Japanese soldiers. The Allies responded to the neutral attitude of the Indonesians by bringing the Dutch and NICA (Netherlands Indies Civil Administration) to regain control of their colonies. There were armed tensions in several Indonesian cities, including Jakarta. This was exacerbated by the existence of the Allies who strengthened their position in Jakarta so that Prime Minister Syahrir on November 19, 1945, determined that TKR and various armies of the struggle of the Indonesian people to leave Jakarta. The reason was that at that time Indonesia was still not strong enough to defend itself from Allied attacks and at the same time get support from international countries. The author uses the theory of international relations, namely preventive diplomacy. The author uses literature review as a research method.

Keywords

Revolution; Jakarta; Diplomacy; Preventive

Abstrak

Tersebarnya berita tentang Proklamasi Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu, Jepang belum angkat kaki dan sementara Sekutu akan datang untuk mengambil para tawannya dan memulangkan prajurit Jepang. Sikap terbuka orang Indonesia yang netral pada Sekutu dibalas oleh Sekutu dengan membongkong Belanda dengan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) untuk kembali menguasai wilayah jajahannya. Terjadi ketegangan bersenjata di beberapa kota Indonesia, termasuk Jakarta. Hal ini diperparah dengan keberadaan Sekutu yang memperkuat kedudukannya di Jakarta sehingga Perdana Menteri Syahrir pada 19 November 1945 menetapkan bahwa TKR beserta berbagai laskar perjuangan rakyat Indonesia untuk keluar dari Jakarta. Alasannya, adalah saat itu Indonesia dirasa masih belum cukup kuat untuk mempertahankan diri dari serangan Sekutu sekaligus mendapatkan dukungan dari negara-negara internasional. Penulis menggunakan teori dari hubungan internasional yaitu diplomasi preventif. Penulis menggunakan kajian pustaka sebagai metode penelitian.

Kata kunci

Revolusi; Jakarta; Diplomasi; Preventif

*Received: April 2021
*Accepted: May 2021

*Revised: May 2021
*Published: May 2021

Pendahuluan

Penulis menuliskan tema tentang Jakarta adalah karena kedekatan emosional dimana penulis adalah yang lahir dan besar di Jakarta. Penulis utamanya merujuk penulisan tentang sejarah Jakarta dari buku "Sejarah Revolusi Fisik Daerah Jakarta" karya G. A. Warmasnyah dkk. menjelaskan tentang bagaimana revolusi fisik di Jakarta pada terjadi. Di dalam buku itu, dijelaskan bahwa memuat uraian tentang keadaan Jakarta tahun 1942, yaitu zaman pendudukan Jepang sampai kemerdekaan negara Republik Indonesia tahun 1945, serta bagaimana reaksi rakyat Indonesia menghadapi mereka. Buku ini juga menjelaskan alasan kota Jakarta yang menjadi kota internasional untuk membuka diplomasi pada Sekutu.

Penulis mengembangkan sudut pandang yang belum ditemukan dalam buku ini, yaitu tentang alasan kota Jakarta menjadi kota diplomasi menurut sudut pandang teori diplomasi preventif. Diplomasi adalah dilakukan dalam rangka menciptakan perdamaian (Satow: 1957, dalam Teguh: 2019). Juga merupakan cara yang dilakukan oleh negara-negara melalui perundingan untuk mengembangkan hubungan antar negara (Mouna: 2000, dalam Teguh: 2019). Dapat disimpulkan bahwa diplomasi adalah upaya mencari perdamaian hubungan antar negara dengan cara berunding. Diplomasi merupakan seni mengedepankan kepentingan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Diplomasi yang digunakan oleh Republik Indonesia pada kurun waktu 1945 - 1949 adalah diplomasi antar pemerintah. Jalur diplomasi bilateral dilakukan terhadap India, Mesi, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda, sedangkan diplomasi multilateral dilakukan melalui keterlibatan dalam setiap pembahasan "Indonesian Question" pada forum PBB (Djelantik, 2016: 120).

Diplomasi preventif adalah Diplomasi preventif menurut Xhentleson, dicirikan dengan lepasnya pengaruh kekerasan yang berbeda dari diplomasi militer yang utamanya diarahkan pada pembatasan atau lenyapnya kekerasan (Murati, 2016). Sedangkan dari segi tujuan, diplomasi preventif menurut Djelantik (2007) dilakukan guna sarana pencegahan konflik antar negara ataupun antar negara dengan kelompok minoritas di dalamnya. Selain itu, diplomasi preventif diharapkan mampu mencegah suatu perselisihan menjadi konflik terbuka serta mampu meredam penyebaran suatu konflik apabila telah mencuat ke permukaan (Raharjo, 2019). Gagasan dari Diplomasi Preventif diajukan oleh Dag Hammarskjold yang merupakan Sekjen PBB pada tahun 1953-1961, dan semenjak itu istilahnya terus berkembang untuk menjawab tantangan baru (Murati, 2016). Menurut Michael Llundi, diplomasi preventif adalah tingkatan akhir dari kehidupan konflik, yang dicirikan dengan lepasnya pengaruh militer dan segala yang berkaitan padanya.

Metode

Peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu kajian pustaka. Peneliti menggunakan kajian pustaka dengan pencarian sumber buku dan jurnal di internet. Menurut Mestika Zed, teknik kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Sabiring: 2021).

Hasil dan Pembahasan

Revolusi Fisik di Jakarta : Menuju Kota Diplomasi dalam kurun waktu 1945 – 1950

Proklamasi kemerdekaan sudah dikumandangkan, dan disebarluaskan secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri meski di bawah dalam bayang-bayang ancaman Jepang yang tersisa. Para pemuda juga melakukan perebutan jawatan maupun gedung-gedung lembaga pemerintahan yang penting. Di sisi lain, Jepang sudah menyerah pada Sekutu dan berjanji menjaga status quo (keadaan sebelum ekspansi) dari daerah jajahannya terhitung tanggal 15 Agustus 1945. Maka dari itu, para pemuda yang ada di Jakarta dari awal September kemudian melakukan perebutan yang utamanya adalah jalur kereta api, yang diikuti dengan kantor pencetakan uang, dan diikuti oleh gedung-gedung pemerintahan yang penting (Hardi, 1983 : 74 – 75). Tidak semuanya berjalan mulus damai, pasukan Jepang masih ada yang melakukan pertempuran dengan para pemuda hingga jatuh korban jiwa.

Masih dalam semangat kemerdekaan, para pemuda mengadakan Rapat Raksasa di Ikada pada 19 September 1945 untuk mengumumkan bahwa Indonesia sudah merdeka. Pastinya Jepang melakukan pelarangan kepada warga, penurunan plakat-plakat, dan bahkan berjaga dengan bersenjata lengkap di sekitar lapangan. Sukarno segera berada di lokasi dan memberitahukan bahwa Indonesia sudah merdeka. Maka, para hadirin yang berjumlah kira-kira ratusan ribu itu kemudian membubarkan diri dan yakin bahwa Indonesia telah merdeka.

Sekutu memang mengetahui bahwa ada pernyataan kemerdekaan, namun mereka awalnya menganggap itu hanya pekerjaan sebagian kecil orang. Sekutu pertama kali datang ke Jakarta pada tanggal 8 September 1945 dengan terjun payung di Kemayoran dibawah pimpinan Mayor Greenhalgh, dan terus semakin kuat kedudukannya (Hardi, 1983 : 82). NICA yang dibonceng Sekutu, kemudian menambah kecurigaan bagi penduduk Indonesia. Terjadilah berbagai kerusuhan yang terdapat di wilayah Indonesia, terutama di daerah Jakarta antara para warga dan Sekutu. Maka disini pula, disebut masa “bersiap” karena warga akan teriak “bersiap” begitu orang Belanda datang ke kampung-kampung mereka untuk bertempur (Hardi, 1983 : 69).

Jatuh korban di kedua belah pihak. Syahrir yang kemudian menjadi Perdana Menteri. Maka dari itu, pada 19 November 1945 mengumumkan bahwa Jakarta akan menjadi kota yang terbuka untuk diplomasi, angkatan bersenjata maupun laskar perjuangan Indonesia harus meninggalkan kota Jakarta (Saleh, 1992: 35). Jatuh korban di kedua belah pihak. Syahrir yang kemudian menjadi Perdana Menteri. Maka dari itu, pada 19 November 1945 mengumumkan bahwa Jakarta akan menjadi kota yang terbuka untuk diplomasi, angkatan bersenjata maupun laskar perjuangan Indonesia harus meninggalkan kota Jakarta (Saleh, 1992: 35).

- Di sebelah Barat terdapat Front Pesing yang diduduki oleh pasukan dari Resimen 4 Tangerang,
- Timur terdapat Front Bekasi yang diduduki oleh pasukan dari Resimen 5 yang berfungsi sebagai pintu gerbang daerah kekuasaan RI di bagian Utara pulau Jawa yang paling berat.

Pintu gerbang ini mempunyai nilai strategis politis maupun militer bagi RI, sehingga harus dipertahankan. Menurut maklumat Pemerintah RI dan pernyataan pihak Sekutu, batas daerah kekuasaan tentara Sekutu di sebelah Barat adalah Kali Cakung, sedangkan di daerah timur Kali Cakung ini adalah wilayah kekuasaan RI. Antara kedua daerah ini terdapat suatu daerah yang disebut sebagai garis pemisah yang tidak dikuasai satu pihak, sehingga disebut "Daerah Tak Bertuan".

Pemuda yang tergabung dalam LRDR (Lasjkar Rakjat Djakarta Raja) kemudian tetap berada di Jakarta untuk menghadapi Sekutu yang membuat sarang dan semakin kuat. Mereka tidak mempercayai Pemerintah Pusat Indonesia yang meninggalkan Jakarta begitu saja tanpa perlawanan (Cribb, 1990: 205).

Sebagai bukti kota Jakarta menjadi kota diplomasi, adalah diadakannya pameran seni yang terletak di Gedung Sekolah Tinggi Salemba pada 27 Desember 1945 (sekarang Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) yang mengundang Sjahrir dan Christison sebagai panglima AFNEI, serta para wartawan asing. Hal ini menyiratkan bahwa Indonesia di mata internasional sebagai bangsa yang beradab dan bukan biadab (Saleh, 1992: 43).

Namun sebagai akibat dari kebijakan ini, Jakarta tidak dilindungi oleh pasukan yang membela Indonesia. Sekutu semakin merajalela berkuasa di Jakarta. Hawthorn sebagai panglima pasukan Inggris di Jawa, Madura, Bali, dan Lombok menetapkan hukum Darurat Militer pada 23 Oktober 1945, yang berarti siapapun dicurigai akan ditembak di tempat (Saleh, 1992: 44). Selanjutnya, Sekutu yaitu Inggris dan Belanda dengan Indonesia untuk membentuk satuan polisi yaitu disebut Civil Police (CP) pada 29 Desember 1945 (Saleh, 1992: 44). Namun keberadaan mereka justru membuat warga Jakarta pada umumnya ketakutan. Hal ini disebabkan karena mereka menangkap dan menembaki orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung kepentingan Republik Indonesia. Bahkan diantaranya ada orang-orang NICA yang menggunakan seragam CP untuk meneror secara menembak secara babi buta pada warga.

Melihat keadaan yang makin gawat, Presiden dan Wakil Presiden serta rombongannya memindahkan ibukotanya ke Yogyakarta pada 1946, meninggalkan Sjahrir dan Soewirjo serta rombongannya untuk berkoordinasi dengan Sekutu. Perjuangan diplomasi tidak sampai disitu. Belanda yang mendapat tekanan dari Inggris, yang diwakili oleh Van Mook sebagai Panglima NICA berdiplomasi dengan Sjahrir membentuk sebuah "Kesepakatan Jakarta" tentang pembagian wilayah (Djelantik, 2016: 124).

Namun, perundingan ini mengalami jalan buntu karena kesalahpahaman setiap butir-butir diplomasi. Maka, perundingan dilanjutkan di Hoge Veluwe, Belanda untuk

meneruskan Kesepakatan Jakarta. Namun, ini juga berakhir buntu. Konflik berdarah tetap berlanjut dan masing-masing belum mencapai kesepakatan masing-masing. Perjanjian Linggarjati ditandatangani antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini menjadi kontroversi karena masing-masing Indonesia dan Belanda tidak puas dengan penandatanganan ini.

Bagi pihak Indonesia, berarti wilayah Indonesia semakin kecil. Sementara bagi Belanda, Van Mook tidak disukai negerinya karena Van Mook membuat Belanda mengakui Indonesia dan memberikan konsensi yang berlebih. Karena masing-masing masih tidak puas, maka konflik ini berlanjut pada pengerahan pasukan Belanda besar-besaran ke Indonesia. Belanda menyebutnya “Aksi Polisionil” sedangkan Indonesia menyebutnya “Agresi Militer Belanda I” yang dilakukan pada 1947.

Hal ini mengakibatkan beberapa tokoh seperti walikota Soewirjo dan beberapa pejabat lainnya ditangkap Belanda. Wilayah Jakarta menjadi milik Sekutu sepenuhnya, yang membuat nama dan peraturan Stadsgemeente Batavia sebelum kedatangan Jepang kembali berlaku (Warmansyah, 1997: 141). Wilayahnya juga ditambah oleh Kemayoran yang diniatkan Belanda untuk menampung perumahan bagi penduduknya.

Keadaan Jakarta terus tetap seperti ini. Agresi Militer II yang berlangsung pada 1948 Belanda berhasil menyerbu Yogyakarta sebagai ibukota dan para pemimpin Indonesia ditangkap. Untung pada saat itu lah, Pemerintah Pusat sempat memerintahkan pendirian PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) di Bukittinggi untuk mencegah Sekutu menghabisi Republik Indonesia. Sampai pada Pengakuan Kedaulatan Belanda pada Indonesia pada Desember 1949. Jakarta dikembalikan sebagai ibukota negara Indonesia, dan pada 1950 diatur tentang wewenang baru yang menggantikan peraturan Belanda sebelumnya. Namanya resmi menjadi “Kotapradja Djakarta Raja” dengan penambahan beberapa wilayah administratif.

Teori Diplomasi Preventif

Teori Diplomasi Preventif adalah teori yang diambil dari studi hubungan internasional. Teori Diplomasi Preventif adalah upaya pihak-pihak yang berusaha untuk mencapai perdamaian yang diusahakan sebelum konflik semakin memburuk. Diplomasi preventif mengharuskan pihak-pihak yang berseteru meletakkan kekuatan militer mereka sejenak dalam konflik dan bersedia duduk dalam diplomasi untuk menemukan titik terang dari permasalahan yang mereka hadapi. Instrumen penting dalam pelaksanaan diplomasi preventif ini adalah (Murati, 2018: 21-27):

- a. Membangun diplomasi preventif dibutuhkan rasa saling kepercayaan satu sama lain. Hal itu dapat dilaksanakan jika adanya saling percaya tingkat tinggi.
- b. Membangun lembaga yang merujuk langkah formal dan informal dalam menyusun lembaga, dalam mencapai kepentingan masing-masing.
- c. Pengawasan perkembangan politik, militer, lingkungan, dan ranah lainnya untuk mencegah terjadinya bencana kemanusiaan seperti kekerasan.
- d. Aksi preventif kemanusiaan yang utamanya memperhatikan pencegahan dari timbulnya korban dari konflik politik selayaknya kemanusiaan yang telah terjadi.

Diplomasi preventif ini mempunyai kelebihan dan kekurangan (Raharjo, 2018). Jika dilaksanakan sungguh-sungguh, diplomasi preventif menjadi cara untuk mengakhiri konflik dengan korban seminimal mungkin, karena dilakukan sebelum konflik menjadi lebih parah. Namun kekurangannya, adalah masing-masing pihak tidak serta merta mau saja meletakkan kekuatan militer mereka karena masing-masing diantara mereka baik diantara kelompok maupun di luar kelompok mereka merasa curiga dan takut kalau-kalau pihak lawan akan melakukan kecurangan. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat yang benar-benar bisa hentikan mereka untuk menumpahkan korban lebih banyak lagi.

Kota Jakarta menjadi Kota Diplomasi menurut pandang Diplomasi Preventif

Penetapan Jakarta sebagai Kota Diplomasi adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah korban diantara Indonesia menjadi lebih banyak lagi. Dalam perkembangannya, konflik yang sudah muncul di sekitaran September 1945 justru semakin membesar. Himbauan untuk angkatan bersenjata Indonesia beserta laskar perjuangan untuk meninggalkan Jakarta, tidak serta merta membuat Sekutu meletakkan kekuatan militernya. Aksi serangan yang dilatarbelakangi oleh dendam di masing-masing pihak antara Republik dan NICA yang memanfaatkan Jepang yang tersisa hanya dibiarkan oleh Sekutu yang tak berniat melerai konflik.

Malah, wilayah Indonesia terutama di Jakarta perlahaan direbut oleh Belanda. Mereka kembali merebut perkantoran-perkantoran yang sebelumnya sudah direbut oleh para pemuda yang pro Republik. Bahkan juga melakukan aksi terror dan pembunuhan di berbagai wilayah di kota Jakarta. Bagi pihak Indonesia sendiri, muncul kelompok oposisi di pemerintahan Sjahrir mendesak agar Indonesia untuk bersikap bermusuhan dengan Belanda tanpa kompromi. Sekelompok pemuda yang tergabung dalam LRDR dan beberapa laskar lainnya yang menolak pergi, juga tetap memperjuangkan tanahnya yang sedang direbut oleh Sekutu.

Namun di sisi lain, dengan berlanjutnya konflik antara Indonesia dan Belanda di dalam dan di luar Indonesia menimbulkan simpati dari beberapa negara. Amerika Serikat pernah mendesak Belanda untuk mencari jalan keluar dari konflik atau bantuan pasca Perang Dunia Kedua yaitu Marshall Plan akan dihentikan. India juga pernah mendesak Inggris untuk menyelesaikan konflik dengan Indonesia atau mereka juga akan ambil tindakan drastis dan pernah membantu Indonesia dengan diplomasi beras.

Belanda yang terus ditekan, apalagi dengan Agresi Militer I dan II yang mereka lakukan kemudian terpaksa membawa kasus ini pada PBB. Yang kemudian berujung pada Konferensi Meja Bundar (KMB) dimana akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Jakarta kembali menjadi ibukota Republik Indonesia dan menata kembali pemerintahannya pada 1950.

Kesimpulan

Bahwa revolusi yang dilakukan bangsa Indonesia, baik perlawanan secara fisik maupun diplomasi bukanlah hal yang mudah dilakukan. Perlawanan yang dilakukan akan meminta korban harta dan utamanya jiwa, diselingi dengan berbagai pelanggaran hak

asasi manusia. Dendam dan keserakahan yang tidak pernah terselesaikan, akan menjadi kerugian dan bencana bagi umat manusia. Revolusi fisik yang menjadi sejarah besar bagi umat manusia khususnya bagi bangsa Indonesia dan Belanda, akan menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi masa depan.

Daftar Rujukan

- Blackburn, S. (2012). *Jakarta : Sejarah 400 Tahun*. Jakarta : Komunitas Bambu.
- Cribb, R.B. (1990). *Gejolak revolusi di Jakarta 1945-1949: Pergulatan antara otonomi dan hegemoni*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Djelantik, S. (2016). *Diplomasi dalam Politik Global*. Bandung: Unpar Press.
- Hardi, L dkk. (1983). *Samudera Merah Putih*. Jakarta: C.V. ROFINDO,.
- Hasan, I dkk. (1955). *Republik Indonesia Kotapraja Djakarta Raya*. Jakarta: Kementrian Penerangan.
- Murati, B. (2018). The role of Preventive Diplomacy. *European Journal of Research in Social Sciences*, 6(2), 21-27.
- Raharjo, T.A. (2019). Penjelasan mengenai Diplomasi Preventif, <https://jurusanhi.com/penjelasan-mengenai-diplomasi-preventif/>, diakses pada 15 April 2021.
- Sabiring, U dkk. Kebijakan Politik Perdana Menteri Sutan Syahrir Untuk Mempertahankan Kemerdekaan RI. *FKIP Unila*, 2021: 1-12.
- Saleh, RHA. (1992). *Dari Jakarta kembali ke Jakarta*. Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah,
- Warmansyah, G. A. dkk., (1991). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1949)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.